

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220/0/1981
tantang
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- mbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar ;
c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.

- ingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14/A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan N. 0222h/0/1980.

erhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81.

M E M U T U S K A N :

- apkan :
mu : Monunggulkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang name serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
l u a : Monuguskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-nokolah filial tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah penjelasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
ja : Biaya untuk koperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada masing anggaran sebagaimana tersebut dalam Kolom 7 Lampiran Keputusan ini ; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berdasar dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
pat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 10 tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjorasono)

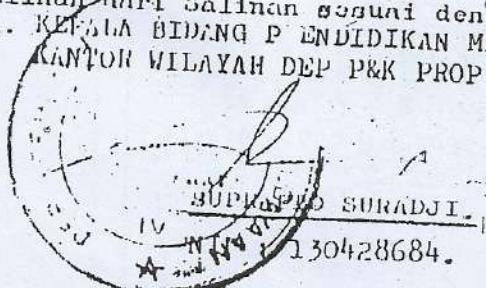
RM Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
semua Menteri Koordinator,
semua Menteri Negara,
semua Menteri,
semua Menteri Muda,
Ketjen Dep. P dan K,
Inspektor Jenderal Dep. P dan K,
semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
spala BP3K pada Dep. P dan K,
semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
Itjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
dan Administrasi Kopogawaian Negara,
dan Penyelidikan Keuangan,
tjen Anggaran,
tjen Pajak,
tjen Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
semua Kantor Perbendaharaan Negara,
semua DPR - RI,
misai II DPR-RI.
semua yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,
Cap/ttd.

(Soetanto, SH.)

Linan Wiri Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT



JAWA BARAT	1. SMP Negeri 1 Sindangsarang	2. SMP Negeri 2 Cianjur	3. SMP Negeri 1 Subang	4. SMP Negeri 2 Tangerang	5. SMP Negeri 1 Cilegon	6. SMP Negeri 2 Cilegon
2. SMP Negeri Jalan Caga-k	Filial SMP Negeri 1 Subang	Sindangsarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.1		
3. SMP Negeri Pondokgede	Filial SMP Negeri 1 Subang	Jalan Caga-k	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.1		
4. SMP Negeri Cilegon	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Pondokgede	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1036.23.01.02.1		
5. SMP Negeri Cilegon	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1036.23.01.02.1		
6. SMP Negeri Cilegon	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1035.23.01.02.1		
7. SMP Negeri Cilegon	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1035.23.01.02.2		
8. SMP Negeri Cilegon	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1036.23.01.02.2		
9. SMP Negeri 1 Kalipucang	Filial SMP Negeri 1 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Bogor	09.1.2.1036.23.01.02.2		
10. SMP Negeri Pasuruan	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cilegon	Kabupaten Majalengka	09.1.2.1036.23.01.02.2		
11. SMP Negeri Cikarang	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1036.23.01.02.2		
12. SMP Negeri Bekonjong	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1036.23.01.02.2		
13. SMP Negeri 1 Kando	Filial SMP Negeri 1 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1036.23.01.02.3		
14. SMP Negeri Dadidhardja	Filial SMP Negeri 1 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Garut	09.1.2.1036.23.01.02.3		
15. SMP Negeri Lebuhan	Filial SMP Negeri 1 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1036.23.01.02.3		
16. SMP Negeri Ngarak	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1036.23.01.02.3		
17. SMP Negeri Pobayuran	Filial SMP Negeri 1 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Pandeglang	09.1.2.1036.23.01.02.3		
18. SMP Negeri Kutapadaci	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1036.23.01.02.3		
19. SMP Negeri Cisontrol	Filial SMP Negeri 2 Cilegon	Cikarang	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1036.23.01.02.3		
20. SMA Negeri Tanjungsari	Filial SMA Negeri Sunmadang	Rancabali	Kabupaten Karawang	09.1.2.1036.23.01.02.3		
21. SMA Negeri Leuwiliang	Filial SMA Negeri 1 Bogor	Tanjungsari	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1036.23.01.02.3		
22. SMA Negeri Parawak	Filial SMA Negeri Subang	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	09.1.2.1036.23.01.02.3		
23. SMA Negeri 2 Tangerang	Filial SMA Negeri Cimahi	Pamulihan	Kabupaten Subang	09.1.2.1036.23.01.02.3		
24. SMA Negeri 2 Cimahi	Filial SMA Negeri Cimahi	Tangerang	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1036.23.01.02.3		
25. SMA Negeri 3 Bogor	Filial SMA Negeri 2 Bogor	Cimahi Tengah	Kota Administratif Cimahi	09.1.2.1036.23.01.02.3		
		Bogor Timur	Kotamadia Bogor	09.1.2.1036.23.01.02.3		

Ej. Kepala Organ Perayusan Panganan Peraturan
Pertanahan dan Dep.P dan K
Cap. ttd.
Socijote, SH
NLP.130317258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.b.b.

Sekretaris Jenderal
ttd.

Socjato Hirjoansojo

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
Dr. KEPALA MTDK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KL. KEPALA MTDK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAWA BARAT

MIA 111 61
5/10 : 8,

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
ALAMAT JALAN LAKS (L) R.E. HARTADINATA 209 TELFON. 73265 BANDUNG

nomor : 404 /I.02.4/D 1981

pp. : 1 (satu) stel

: Pengololaan sekolah yang ditunggalkan dan yang dibuka.-

Bandung, 23 September 1981

Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri Pengolola Filial yang ditunggalkan
2. Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri pengolola SMP/SMA Unit baru thn 81/1981 di JAWA BARAT..

Sohitungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor :0219/0/81 dan Nomor : 0220/0/1981 tanggal 14 Juli 1981 yang salinannya terlampir, kami harapkan perhatian Saudara akan hal hal sebagai berikut :

1. SMP/SMA Negeri yang namanya terlampir dalam Surat Keputusan tersebut diatas, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981 secara resmi telah ditunggalkan dan dibuka sebagai suatu sekolah yang mandiri.
2. Sambil menunggu penetapan Kepala SMP/SMA Negeri secara definitif, akan di terbitkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat kepada salah seorang jabatan untuk sementara mengolola SMP/SMA baru tersebut.
3. Ikundaknya Saudara segera membuat cap dan papan nama sekolah menurut petunjuk terlampir.
4. Saatnya diusulkan calon Bendahara wan UUDP dan SPP menurut persyaratan yang berlaku, bila perlu mengambil salah seorang Guru/Pegawai Tata Usaha dari SMP/SMA pengolola.

Demikian agar Saudara maklum,-

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Drs. SOEKIRNO

JUSAN kepada Yth :

Opala Kantor Wilayah Departemen P dan K NIP. 130030233.
Propinsi Jawa Barat di Bandung, sebagai laporan,
Opala Kantor Departemen P dan K k/
Yudha